

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beijing Summer Olympics 2008 atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Beijing Olympics 2008* merupakan perhelatan olahraga internasional yang diadakan di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 8 hingga 24 Agustus 2008 silam. Sejumlah pertandingan cabang olahraga profesional seperti Sepak Bola, Akrobatik, Berkuda, Tenis, Angkat Besi, dan lain-lain telah berhasil diikuti oleh lebih dari 10.000 atlet dari 204 negara (Beijing Olympic City Development Association, 2008). Selain itu, acara olahraga internasional terbesar ini juga mengadakan *Beijing Paralympic Games 2008* yang ditujukan untuk para atlet yang memiliki keterbatasan fisik dalam dua puluh cabang olahraga diantaranya seperti Anggar Kursi Roda, Atletik, Boccia, Tenis Kursi Roda, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* ini tidak hanya menjadi ajang bergengsi bagi kalangan atlet di setiap cabang olahraga yang ada saja, namun juga sangat berpengaruh besar guna memelihara hubungan yang baik bagi setiap negara yang berpartisipasi didalamnya. Dalam studi Hubungan Internasional, penyelenggaraan olimpiade internasional ini dapat dikategorikan dalam *Mega Sport Events* (MSE).

Dilansir dari pernyataan Paul Close, David Askew, dan Xu Xin dalam buku mereka yang berjudul *The Beijing Olympiad: The Political Economy of a Sporting Mega-Event*, para penulis menyadari bahwa ajang olahraga internasional *Beijing Olympics 2008* ini memiliki signifikansi besar bagi Republik Rakyat Tiongkok karena dapat dikatakan sebagai salah satu upaya penyeimbangan globalisasi serta akuntabilitasnya yang diakui untuk berbagi masalah dan isu yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan antara Barat, Utara, Selatan dan negara-negara lainnya (Close, Askew, & Xin, 2007). Selain itu, ajang *Beijing Olympics 2008* juga banyak diharapkan dapat menjadi wadah perekat hubungan antara Tiongkok dan Taiwan (Kasogi, Kepentingan Tiongkok Melakukan Diplomasi Publik, 2017). Sebab, praktik penyelenggaraan pertandingan olahraga internasional seperti ini, hubungan antara peserta dan taktik yang diadopsi yang dalam konteks adalah hubungan antara Tiongkok dan Taiwan ini memiliki karakteristik politik yang spesifik (Lee P.-C. , 2011). Sehingga, agenda internasional seperti ini seharusnya dapat menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki hubungan antara dua negara yang telah lama berkonflik seperti Taiwan dan Tiongkok.

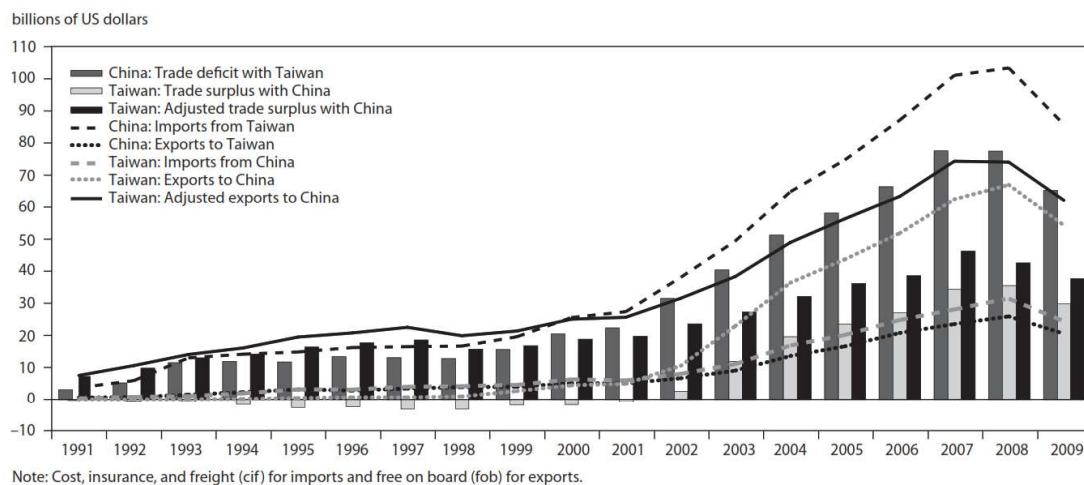
Jika ditarik kembali dari latar belakang sejarah, hubungan Tiongkok dan Taiwan dalam keikutsertaannya pada *Sporting Mega-Event* tidak terlepas dari status politik kedua entitas tersebut setelah tahun 1949. Hubungan Tiongkok dengan *International Olympic Committee* (IOC) berawal pada tahun 1942 dibawah pemerintahan dari *Republic of China* (ROC). Pada saat itu, tim *China National Amateur Athletic Federation* secara sah diakui oleh IOC sebagai *Olympic Committee* di Tiongkok, dan menjadi perwakilan sah dalam partisipasi *Olympic Games* ke-10 di Los Angeles 1932, ke-11 di Berlin 1936 dan ke-14 di London 1948. Pada tahun 1949 Partai Kuomintang (KMT) atau dikenal *Chinese Nationalist Party* setelah kekalahannya dari *Chinese Communist Party* dalam perang sipil tahun 1949, memutuskan untuk mundur dan mengambil alih Taiwan dan mendirikan *Republic of China* (ROC). Bersamaan dengan berpindahnya KMT dan didirikannya ROC di Taiwan, tim *Olympic Committee* yang diakui secara sah tersebut juga sebagian besar mengikuti pemerintah ROC di Taiwan dan berhasil untuk tetap memiliki kontak dengan IOC, sebagai klaim yuridiksi atas *Olympic Affairs* antara China Mainland dan Taiwan (Kolatch, 1972).

Berangkat dari latar belakang sejarah tersebut, hubungan antar kedua negara ini menjadi daya tarik kuat untuk ditelusuri. Terlebih catatan sejarah tersebut sampai melahirkan sebutan *Two China* karena keraguan *International Olympic Committee* untuk sekedar menentukan tim negara mana yang dapat berpartisipasi dalam Olimpiade. Keraguan IOC ini kemudian melahirkan proposal yang berisi kebijakan untuk kedua belah pihak yakni *People's Republic of China* (PRC) dan *Republic of China* (ROC) atau yang kini lebih dikenal dengan nama Tiongkok dan Taiwan. Dinamika hubungan politik antara Tiongkok dan Taiwan menjadi semakin menarik ketika Presiden Taiwan pada saat penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* berlangsung, Ma Ying-jeou menyatakan ketidaksediaannya untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok, Hu Jintao, guna membahas pembawaan obor olimpiade ke Taiwan sebelum akhirnya digunakan untuk membuka *Beijing Olympics 2008*. Ma menggambarkan hubungan Taiwan dengan Tiongkok sedang stagnan dalam kurun delapan tahun terakhir sebelum penyelenggaraan olimpiade tersebut berlangsung (Rhoads & Young, 2008). Padahal, menurut Jonathan Kolatch, perjuangan politik melalui olahraga dapat dengan mudah dilihat sebagai arena pilihan yang terkait erat dengan identitas diri (Kolatch, 1972). Namun, media masa justru lebih banyak menelisik hubungan Taiwan dan Tiongkok yang justru tidak menemui titik tengahnya baik sebelum, sesaat, dan sesudah *Beijing Olympics 2008* ini berlangsung. Oleh karena itu, perhelatan olahraga internasional menjadi menarik untuk dipertanyakan dampaknya

terhadap hubungan bilateral antara Tiongkok dan Taiwan mengingat acara serupa juga diadakan kembali pada tahun 2022 ini.

Kondisi hubungan bilateral antara Tiongkok dan Taiwan pasca diadakannya *Beijing Olympics 2008* paling mudah diamati melalui sektor ekonomi dan politik yang tidak menunjukkan signifikansi perubahan yang menurut Jonathan Kolatch seharusnya momen penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti *Beijing Olympics 2008* ini dapat menjadi perjuangan politik bagi kedua negara. Dalam sektor ekonomi, kerjasama perdagangan antar kedua negara mengalami penurunan yang cukup terlihat setelah pertumbuhan yang terus meningkat sejak awal tahun 2000-an. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui bagan Data Perdagangan Lintas Selat, Arus Nominal dan Arus yang disesuaikan antara Tiongkok dan Taiwan sejak tahun 1991-2009 berikut:

Gambar 1.1 Perdagangan Barang Lintas Selat, Arus Normal dan Arus yang disesuaikan



Sumber: *General Directorate of Customs, Taiwan; Bureau of Foreign Trade, Taiwan; China Customs, <http://english.customs.gov.cn>; Hong Kong Customs*

Melalui data tersebut, aktivitas perdagangan ekspor-impor mengalami penurunan pada tahun 2008, yang mana pada tahun tersebut pagelaran *Beijing Olympics 2008* berlangsung. Namun, menurut artikel yang diterbitkan oleh *Peterson Institute for International Economics*, penurunan tersebut diakibatkan oleh krisis arus perdagangan global yang memang sedang terjadi pada tahun tersebut. Argumen tersebut dibuktikan oleh peningkatan hubungan perdagangan bilateral yang kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai \$25 billion pada kuartar pertama 2010 (Rosen & Wang, 2011). Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* ini tidak memberikan dampak yang begitu signifikan pada sektor kerjasama perdagangan yang pada akhirnya peningkatan yang terjadi masih

berlangsung sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rosen & Wang (2011) bahwa hubungan ekonomi Tiongkok dan Taiwan secara sempit maupun dalam konteks regional atau global yang melingkupinya tidak terdapat *status quo* ekonomi yang dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Dalam sektor politik, kedua negara tersebut masih mengalami stagnansi hubungan yang tidak banyak berubah mengingat latar belakang hubungan keduanya yang bermula dari perbedaan paham politik. Hal tersebut tercermin dari pernyataan

“The ‘One China Principle’ of Chinese foreign policy allows no expression of the existence of the ROC [Taiwan] as a sovereign state (...) Thus any move toward independence by Taiwan could provoke a military reaction in Beijing that would disrupt the Olympic Games. Taiwan is more important than the Olympic Games because it is considered a question of national sovereignty” (Brownell, 2008)

Melalui pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara politis, Tiongkok sangat bersikeras terhadap “*One China Principle*” yang berusaha untuk mengikis persepsi universal mengenai keberadaan “*Two China*” dalam pagelaraan olahraga *Beijing Olympics 2008* ini. Tiongkok percaya bahwa olahraga dapat menjadi subjek yang tepat untuk mempromosikan kebijakan luar negeri-nya terkait *One China Principle* (Chan, 2002). Namun, sejak awal berpisahanya kedua wilayah ini, respon Taiwan selalu menyiratkan keterasingan kedaulatan dengan Tiongkok. Sehingga kita dapat menemukan kontradiksi prinsip yang dipegang oleh kedua negara tersebut masih berlangsung sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* ini diadakan. Memang, Tiongkok tidak pernah secara tersirat menyiratkan secara simbolis bahwa pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintah yang sah di seluruh Tiongkok, namun kita juga harus realistis atas keberadaan Taiwan yang memang sudah secara resmi diakui oleh PBB, IOC dan hampir 200 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan (Thesbjerg, 2007). Dari perbedaan prinsip ini, kita dapat menemukan bahwa masih terdapat penghalang besar dalam hubungan politik Tiongkok dan Taiwan. Konstelasi hubungan kedua negara yang dulunya pernah bersatu ini kemudian menjadi sangat menarik untuk dibahas khususnya pasca berlangsungnya *Beijing Olympics 2008* mengingat baik Tiongkok maupun Taiwan pasti memiliki *national interest* mereka masing-masing. Tidak mudah membedah dampak berlangsungnya olimpiade ini terhadap hubungan kedua negara mengingat terdapat banyak faktor yang juga berpotensi menjadi pengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara ini, seperti sektor pertumbuhan ekonomi, inflasi, turism, dan berbagai kemungkinan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dampak *Beijing Olympics 2008* terhadap hubungan bilateral Tiongkok dan Taiwan?

1.3 Tujuan Penelitian

Diskusi pembahasan mengenai hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan tidak pernah hentinya menarik untuk dikaji. Sehingga, penelitian ini dilakukan guna menganalisis dan memahami dampak ajang olahraga internasional *Beijing Olympics 2008* ini terhadap hubungan bilateral antara Tiongkok dan Taiwan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian terdahulu yang membahas mengenai hubungan bilateral antara Tiongkok dengan Taiwan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* telah beberapa kali dilakukan. Dalam salah satu penelitian yang ditulis oleh Ping-Chao Lee (2011) dijelaskan bahwa ajang perhelatan olahraga internasional *Beijing Olympics 2008* mencontohkan politik olahraga lokal antara Tiongkok dan Taiwan yang terlibat dalam sistem politik olahraga global. Pada penelitian tersebut, Lee menggunakan Teori *Strategic Relations* atau hubungan strategis antara partisipan dengan penyelenggara acara yang dalam hal ini adalah Taiwan dengan Tiongkok (Lee P.-C. , 2011). Pendekatan tersebut menekankan bahwa sebuah entitas harus berfokus pada tingkat yang lebih kongkret pada sifat '*strategic action*' dan '*strategically selective context*' di mana aksi semacam itu di rumuskan, agar keberdampakannya dapat dirasakan oleh entitas yang lain (McAnulla, 2007). Dengan menggunakan Teori Hubungan Strategis ini, penulis menganalisis pergerakan Tiongkok, Taiwan dan IOC dalam *Beijing Olympics 2008*, dengan fokus pada serangkaian perdebatan seputar skema pengusulan rute estafet obor Olimpiade 2008 yang muncul sejak 2007 yang kemudian melibatkan kepentingan politik dan manajerial dalam pengelolaan sistem yang ada.

Selain penelitian yang berhubungan secara langsung dengan topik pembahasan hubungan bilateral Tiongkok dan Taiwan, penelitian terkait serupa juga pernah dilakukan oleh Jih-Un Kim dalam artikelnya. Artikel ini berangkat dari asumsi penulis terhadap nasionalisme populer yang dirasakan mayoritas penduduk Tiongkok serta sentiman anti-Korea yang banyak mewabah di kalangan masyarakat Tiongkok pada saat penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* berlangsung. Kemudian, jika diamati secara empiris, hubungan luar negeri Tiongkok tampaknya memiliki pandangan *Constructivist Pessimist* atau Pesimis Konstruktivis yang dibangun oleh faktor nasionalisme warga negaranya. Artinya, secara garis besar, keterlibatan

warga dalam membangun citra buruk Korea seolah telah menjadi argumen yang disepakati bersama sehingga pandangan umum ini dapat mengikat tangan para pembuat kebijakan luar negerinya. Alhasil, sejumlah kegiatan kerjasama antara Tiongkok dan Korea dalam sektor perdagangan ekspor-impor sempat mengalami hambatan pada saat olimpiade berlangsung. Protes dan kritik yang dilakukan masyarakat Tionghoa terhadap Korea ini dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah kedua negara yang sempat berkonflik pada masa Perang Dunia II (Kim, 2011). Analisis dalam penelitian terdahulu ini dapat membantu metode penelitian yang juga akan digunakan pada penelitian ini. Ide dasar mengenai *Constructivist Pessimist* dapat diadaptasi juga untuk memahami mengapa hubungan antara Tiongkok dan Taiwan sukar untuk berdamai bahkan setelah perhelatan olimpiade ini usai dilaksanakan.

Dalam setiap penyelenggaraan olahraga internasional yang melibatkan banyak negara, fenomena menguatnya *National Identity* yang tentunya disandingkan dengan meningkatnya nasionalisme di kalangan masyarakat warga negara telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Penelitian berikutnya menganalisis perubahan longitudinal dalam identitas nasional yang terjadi sebelum, selama dan setelah *Beijing Olympics 2008*. Tiongkok sendiri selaku tuan rumah memegang peranan penting dalam momentum dan intensitas perubahan identitas nasional ini. Patrick W.C. Lau dkk selaku peneliti mengungkapkan bahwa Tuan Rumah telah menjadi andil terbesar dalam pembentukan *National Identity* negara-negara yang menjadi partisipan sebab terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan identitas ini. Seperti iklim politik dan persepsi budaya yang berkembang. Bagi Taiwan, kondisi iklim politik yang tidak stabil dengan Tuan Rumah Tiongkok menyebabkan mereka harus mempertahankan identitas *low profile* untuk menghindari konflik antar budaya yang berpotensi terjadi (Lau P. W., Lam, Leung, Choi, & Ransdell, 2012). Penelitian ini menjadi sangat menarik untuk lebih mendalami respon Taiwan terhadap *branding* negaranya yang bukan tidak mungkin telah tertanam secara *Constructivist Pessimist* di kalangan masyarakat Tiongkok.

Penelitian serupa yang masih rekat kaitannya dengan *branding image* dengan menjadi *host country* di ajang olimpiade internasional juga pernah dilakukan oleh Tasci, Hahm dan Terry (2019) . Penelitian tersebut menjelaskan kasus *Summer Olympic Games 2016* yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil. Peneliti menyebutkan bahwa penyelenggaraan olimpiade tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap perubahan *image* masyarakat global terhadap Brazil sebelum dan sesudah pelaksanaan olimpiade tersebut. Sebelumnya, para penulis juga menjelaskan mengenai hipotesis mereka yang menjadi dasar penelitian tersebut, yaitu adanya pemikiran masyarakat internasional yang memiliki persepsi negative terhadap Brazil dilingkup

media internasional. Sehingga, seharusnya narasi media lebih memiliki peran dalam pembentukan *nation branding*, namun penyelenggaraan *Summer Olympic Games 2016* yang juga telah mengusahakan *branding image* yang baik dinilai tidak berhasil mewujudkan hal tersebut (Tasci, Hahm, & Terry, 2019).

Secara ekonomi, Asian Trade and Finance dalam *Congressional Research Service Report for Congress* pernah melakukan riset mengenai perekonomian Tiongkok yang dikaitkan dengan *Beijing Olympics 2008* ini (Asian Trade and Finance, 2008). Hasilnya, sejumlah perdebatan oleh para ahli justru ditemukan mengenai metode evaluasi dampak perekonomian *mega-events* sebesar olimpiade seperti *Beijing Olympics 2008* ini. Sehingga, tidak mudah untuk menentukan perubahan ekonomi yang terjadi merupakan dampak dari sektor apa. Apakah benar karena berlangsungnya olimpiade ini, atau karena faktor dampak pertumbuhan ekonomi internasional, inflansi, pariwisata, investasi asing, atau karena faktor lainnya. Padahal, modal ekonomi yang dikeluarkan untuk olimpiade yang telah disiapkan kurang lebih selama tujuh tahun ini juga sangat tidak kecil. Penulis dari Asian Trade and Finance menilai sejumlah kemungkinan biaya dan keuntungan dari penyelenggaraan olimpiade ini. Kemungkinan ini dihitung berdasarkan perkiraan anggaran serta jumlah investasi yang berhasil terkumpul. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat potensi keuntungan yang dapat Tiongkok peroleh diluar karena faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti citra public, prestise, dan *soft power*. Namun, potensi tersebut juga harus terbentur sejumlah permasalahan seperti buruknya kualitas udara di Beijing, isu Hak Asasi Manusia, kontroversi mengenai akses internet yang terbuka bagi para jurnalis yang meliput olimpiade, dan sejumlah isu lainnya. Satu hal yang harus disadari dari riset ini adalah sejumlah premis hanya belum dapat sepenuhnya dibuktikan karena riset ini sendiri ditulis sebelum olimpiade ini berlangsung. Akan tetapi, riset ini memberikan gambaran besar mengenai potensi kemungkinan dampak ekonomi yang akan dirasakan Tiongkok pasca diselenggarakannya olimpiade ini.

Setelah menelusuri sejumlah penelitian terdahulu, penulis menarik benang merah yang dimulai dari argumen mendasar Jonathan Kolatch yang mengemukakan bahwa perjuangan politik melalui olahraga dapat dengan mudah dilihat sebagai arena pilihan yang terkait erat dengan identitas diri. Identitas diri yang dimaksudkan adalah guna meningkatkan citra global sebagai kekuatan ekonomi dan politik sehingga dapat terjalin hubungan baik antar negara dalam berbagai sektor seperti ekonomi dan politik. Penelitian ini nantinya akan mengungkap secara mendalam bagaimana keberlangsungan *Beijing Olympics 2008* berdampak terhadap pelabelan *national identity* baik yang dilakukan Tiongkok maupun Taiwan dalam hubungan

bilateral Taiwan dengan Tiongkok. Penulis juga akan menelaah secara terperinci faktor apa saja yang mempengaruhi pelabelan identitas nasional kedua negara tersebut dalam kaitannya dengan penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengambil beberapa teori yang digunakan untuk membantu proses analisisnya. Teori utama yang digunakan adalah teori Konstruktivis. *Constructivist* merupakan teori dalam Hubungan Internasional yang pertama dikembangkan oleh Robert Keohane dalam “*reflective*” approach. Yang kemudian, seiring berjalannya waktu, ide dasar pendekatan tersebut terus berkembang yang salah satu idenya kini lebih kita kenal dengan “*constructivism*” (Finnemore & Sikkink, 2001). Teori ini mulai berkembang dalam studi Hubungan Internasional setelah Alexander Wendt memulai ide penjelasan alternatif mengenai evolusi sistem bipolar dan “*self-destruction*” yang menyertainya (Wendt A. , 1992). Secara garis besar, premis mendasar yang dibawakan oleh Wendt ini merupakan kritiknya terhadap sejumlah teori dalam Hubungan Internasional yang dianggap tidak rasional. Teori Konstruktivis sendiri lebih berfokus pada peran ide, norma, pengetahuan, budaya, serta argumen dalam politik yang menekankan khususnya pada peran ide dan pemahaman yang dipegang secara kolektif atau ‘*intersubjective*’ dalam kehidupan sosial (Finnemore & Sikkink, 2001). Secara lebih khusus, Konstruktivisme adalah pendekatan analisis sosial yang menegaskan hal-hal berikut: (a) interaksi manusia dibentuk terutama oleh faktor-faktor ideasional, bukan hanya faktor material; (b) faktor ideasional yang paling penting adalah kepercayaan yang dimiliki Bersama atau ‘*intersubjective*’, yang tidak dapat direduksi menjadi individu; dan (c) keyakinan Bersama ini membangun kepentingan dan identitas dari tujuan para aktor (Adler 1997, R & Reus-Smit 1998, Ruggie 1998, Wendt, 1999). Menurut Searle (1995), Konstruktivisme dapat juga disebut sebagai ‘fakta sosial’ yang merujuk pada hal-hal seperti uang, kedaulatan, hak serta hal-hal yang tidak memiliki realitas namun secara kolektif dipercaya oleh orang-orang bahwa hal-hal tersebut ada dan bertindak sesuai dengan itu. Dengan memahami bagaimana fakta-fakta sosial berubah dan cara-cara tersebut mampu mempengaruhi politik adalah perhatian utama dalam analisis konstruktivis (Finnemore & Sikkink, 2001).

Secara lebih mendalam, fundamental Konstruktivisme adalah proposisi bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak hanya menjadi manusia namun untuk hubungan

sosial kita. Dengan kata lain, Konstruktivisme berpendapat bahwa orang membuat masyarakat, dan masyarakat membuat orang (Onuf, 2013). Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antara Tiongkok dan Taiwan, kedua negara tersebut memiliki latar belakang sejarah dan politik yang unik dengan kesamaan identitas etnis (Lin, 2003). Konflik politik yang pernah terjadi antara kedua negara ini telah memfasilitasi banyak diskusi mengenai sejarah dan budaya yang terkait dengan kebangsaan. Pada tahun 1949, Tiongkok dan Taiwan telah menandatangani gagasan bahwa *'two China's'* harus bersaing dalam arena olahraga internasional. Pada saat itu, akhirnya sebagian besar penduduk lokal Taiwan, gelar nasional Taiwan bukan hanya sebuah label untuk mewakili mereka dalam olahraga internasional, namun juga sebagai identitas politik internal. Namun, Tiongkok mempersulit penduduk lokal Taiwan untuk membangun identitas nasional mereka. Tidak heran, *Beijing Olympics 2008* semakin mengkonsolidasi status internasional Tiongkok dan Taiwan yang terisolasi baik di dunia olahraga maupun politik (Bairner & Hwang, 2010). Merujuk pada fenomena tersebut, konsep *National Identity* menjadi elemen yang penting untuk dikaji sebagai bagian utama dari penerapan upaya Konstruktivis yang terjadi dalam penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008*.

Selama ini konsep *National Identity* lebih banyak didominasi oleh fokus pada asal-usul sejarah bangsa dan garis politiknya. Namun demikian, bangsa telah menjadi daya pikat yang kuat karena telah terbukti menjadi bidang imajinatif yang mana serangkaian keprihatinan dapat diproyeksikan. Serta hubungan dapat ditempa dalam berbagai aspek pengalaman sosial, politik dan budaya (Cubbit, 1998). Dewasa ini, model pemancaran *national identity* telah diyakini juga berlabuh di ruang internasional. Namun, dalam ranah yang luas ini, identitas internasional semakin tidak mudah untuk dipahami. Sehingga dibutuhkan sejumlah elemen yang menjadi tolak ukur identifikasi *national identity*. Elemen pertama yang dijelaskan oleh Anthony D. Smith. Berangkat dari pembedahan *Kulturnation* atau bangsa yang bergabung karena adanya persamaan budaya. Elemen ini menjadi elemen tertua karena gagasannya telah dimulai bahkan sejak masa bangsa Yunani kuno yang membagi kumpulan negara-kota nya berdasarkan budaya (Smith, 1991). Klasifikasi seperti ini juga menunjukkan bahwa, yang dimaksud dengan *national identity* berbasis komunitas budaya pasti menyiratkan setidaknya kepentingan politik atau satu kode hak dan kewajiban untuk semua para anggota komunitas ini.

Elemen yang kedua kemudian adalah gagasan tentang *patria*, yaitu komunitas hukum dan institusi yang memiliki persamaan kepentingan politik. Persatuan koloni seperti ini biasanya diekspresikan melalui institusi yang sentralistik. Bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran hukum dan politik di masyarakat dalam komunitas, membuktikan bahwa kesadaran

akan konsep ‘kewarganegaraan’ juga turut hadir didalamnya. Sehingga akan lebih mudah mendefinisikan pemahaman *national identity* melalui pendekatan atau hukum *patria* ini. Selain itu, kesetaraan hukum anggota komunitas politik telah dianggap sebagai bentuk gambaran nilai dan tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi gambaran budaya dan ideologi sipil yang sama. Di Barat, komponen yang menjadi standar terbentuknya identitas nasional adalah sejarah territorial, komunitas hukum dan politik, kesetaraan anggota hukum dan politik, serta ideologi sipil yang sama. Dan keempat komponen tersebut sangat menggambarkan elemen *patria* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Elemen lain yang juga dapat menjadi alat identifikasi *national identity* adalah model etnik. Smith menjelaskan bahwa kerangka model ini sangat jelas karena akarnya dapat dengan mudah ditarik melalui garis keturunan, yang lebih mudah dipahami daripada wilayah. Secara garis besar, dalam konsep ini, *national identity* dapat dilacak akarnya melalui nenek moyang yang sama. Keseluruhan elemen yang telah dijelaskan oleh Smith ini dapat diasumsikan secara umum melalui daftar ciri-ciri mendasar *national identity* sebagai berikut:

1. Sejarah territorial atau tanah air
2. Mitos umum dan kenangan sejarah
3. Budaya massa public yang umum
4. Hak dan kewajiban hukum bersama untuk semua anggota
5. Ekonomi bersama dengan mobilitas territorial untuk anggota

Kemudian, jika dihubungkan dengan unsur *national identity* yang ingin dibangun melalui pagelaran *Beijing Olympics 2008* ini, sejumlah peneliti telah melakukan analisis budaya dan politik yang terjadi dalam acara olahraga global seperti ini. Studi *cross-sectional* sudah pernah dilakukan oleh Lau, Lam dan Leung (2006 & 2007) mengenai kontribusi peran identitas olahraga dan tingkat *physical activity* (PA) pada pembentukan identitas nasional pada anak sekolah Tiongkok. Dan hasilnya menunjukkan bahwa identitas olahraga dan tingkat PA berkorelasi positif dengan identitas nasional. Selain itu, jenis kelamin, usia, tempat lahir, tempat tinggal, identitas olahraga, dan tingkat PA disebut juga terkait dengan identitas nasional.

Berikutnya, konsep lain yang dapat dijadikan landasan pemikiran terhadap benang merah studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai konsep *Major-scale sporting events*, *Major-scale sporting events* atau *Mega Sporting Events* (MSE) didefinisikan sebagai acara olahraga dalam skala besar (internasional) yang diselenggarakan sekali dalam kurun waktu tertentu oleh otoritas khusus dan dilansirkan dapat meningkatkan dampak positif bagi ekonomi,

parawisata, infrastruktur dan berbagai hal lain oleh negara atau kota yang mengadakan (*host*) acara tersebut (Byers, Slack, & Parent, "Mega Events." in *Key Concepts in Sport Management*, 2012). Secara tradisional, penyelenggaraan MSE umumnya hanya dilakukan oleh negara-negara maju di wilayah Amerika Utara dan Eropa, dikarenakan persyaratan sebagai *host country* dalam MSE mewajibkan negara untuk memiliki fasilitas memadai seperti penyelenggaraan Olympic Games, IOC mensyaratkan *host cities* untuk memiliki setidaknya 40.000 kamar hotel untuk Summer Games dan 23.000 kamar hotel untuk Winter Games (IOC, 2018). Pemenuhan fasilitas ini terbilang sangat mahal, sehingga banyak negara berkembang pada waktu itu tidak ikut *bidding* sebagai *host city/ host country* dalam MSE.

Berdasarkan riset dari Robert Baade dan Victor Matheson pada tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelenggaraan MSE oleh *emerging countries* adalah sebagai bentuk pemberian sinyal kepada masyarakat internasional bahwa negaranya mampu dan memiliki kekuatan ekonomi yang pantas untuk memiliki andil lebih besar dalam perpolitikan global (Baade & Matheson, 2017). Hal ini selaras dengan dinyatakan oleh Jonathan Grix dan Donna Lee (2013) bahwa melalui MSE, *host-country* mampu untuk mengkomunikasikan *attractiveness* dari negaranya melalui nilai budaya bersama dalam olahraga, dan tidak sebatas hal tersebut, namun juga keinginan untuk menjadi pemenang dan perayaan secara kolektif serta legitimasi sebagai aktor global (Grix & Lee, 2013). Hal tersebut mengindikasikan bahwa *emerging countries* pada dasarnya melihat MSE sebagai ajang untuk mendemonstrasikan kesanggupan mereka dalam hubungan internasional. Terlebih apabila negara tersebut merupakan negara dengan *negative image*, tampak memiliki keuntungan yang lebih banyak dari mobilisasi *soft power* (secara positif) untuk mengubah citra mereka.

Selanjutnya, hubungan antara Tiongkok dan Taiwan dapat dijelaskan melalui teori hubungan Bilateral yang dapat didefinisikan sebagai terjadinya sebuah interaksi pada sejumlah aspek seperti politik, ekonomi, budaya, serta aspek-aspek lainnya yang melibatkan dua negara melalui kesepakatan bersama (Thompson & Verdier, 2014). Melalui catatan sejarah, hubungan Tiongkok dan Taiwan telah melalui dinamika hubungan politik dan ekonomi yang beragam. Dalam ranah olahraga internasional saja, Tiongkok telah menunjukkan politisasi olahraga yang melengking sehingga merugikan IOC sebagai agen penyelenggara olahraga internasional. Tiongkok yang pada saat itu sudah berpisah dengan Taiwan, mengambil andil secara dominan atas keanggotaannya dalam gerakan olimpiade (Guoqi, 2008). Padahal jika kita tarik garis sejarahnya, Dong Shouyi, anggota IOC yang lebih cenderung memihak pada Taiwan

merupakan pelopor tergabungnya kedua negara tersebut dalam keanggotaan IOC sebelum akhirnya memutuskan berpisah.

1.6 Hipotesis

Penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2008 berdampak pada menguatnya identitas nasional baik yang dibangun oleh Tiongkok maupun Taiwan terhadap pelabelan citra *national identity* yang mereka bangun dalam hubungan bilateral ini. *National identity* yang dibangun oleh Tiongkok terlihat dalam prinsip “*One China*”, dan sedangkan Taiwan lebih menekankan pada kedaulatan kemerdekaannya sebagai negara yang terlepas dari Tiongkok.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1.1 *One China*

Istilah “*One China*” mulanya muncul sebagai kebijakan atau prinsip politik yang diakui baik oleh Tiongkok maupun Taiwan setidaknya hingga sebelum masa Perang Dingin berakhir sekitar pada tahun 1990-an. Kedua negara tersebut bersikeras bahwa hanya ada “*One China*” hingga pada satu decade Perang Dingin berlangsung, Amerika Serikat mulai mengambil andil di dalam konstelasi politik kedua negara tersebut. (Chow, 2008). Pada masa tersebut, baik Tiongkok maupun Taiwan mengklaim mewakili seluruh China, namun tidak ada yang mempertegas klaim tersebut secara yurisdiksi. Hingga, sebelum 1 Januari 1979, pemerintah Amerika Serikat mengakui *Republic of China* atau Taiwan sebagai satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China. Meskipun dalam waktu yang berdekatan, yakni pada tahun 1972, Washington juga melakukan interaksi diplomatic tidak resmi dengan Beijing dalam kunjungan Richard Nixon di Beijing. Setelah AS mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 1 Januari 1979, pemerintah AS berbalik hanya mengakui pemerintah *People’s Republic of China* atau Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah yang sah dari China tanpa menyerah pada klaim Beijing atas kedaulatan Taiwan (Chow, 2008). Akibatnya, muncul dilemma dalam pemahaman prinsip maupun kebijakan *One China* yang kemudian banyak digunakan Tiongkok sebagai dalih pengakuan kedaulatan Taiwan.

1.7.1.2 *National Identity*

Identitas Nasional merupakan pemahaman yang menyediakan sarana yang kuat untuk mendefinisikan dan menempatkan diri individu di dunia, melalui prisma kepribadian kolektif dan budaya khasnya (Smith, 1991). Proses pemaknaan diri dan lokasi dalam banyak hal yang menjadi elemen Identitas Nasional, menjadi hal yang menarik mengingat hal ini cukup berpengaruh besar dalam proses pembentukan proyek nasionalis. Menariknya, identitas nasional tidak hanya membahas mengenai pemaknaan identitas nasional itu sendiri, namun juga mengenai hubungan antar dua negara dengan persamaan identitas yang kemudian menjadi dilemma dalam ruang nasional. Hubungan antar bangsa dengan etnis yang serupa mengalami permasalahan yang tidak pasti. Oleh karena itu, Anthony D. Smith menguraikan tiga alasan mengapa hubungan antar bangsa menjadi menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah bahwa. Secara historis, negara-negara terbentuk atas dasar etnis inti pra-modern, dan karena kuat dan berpengaruh secara budaya, mereka menyediakan model untuk kasus-kasus berikutnya dari pembentukan bangsa-bangsa di banyak bagian dunia.

Yang kedua adalah bahwa model etnik bangsa menjadi semakin populer dan tersebar luas, bukan hanya karena kalangan atas, namun juga karena begitu mudah memasuki komunitas 'demotik; yang dengan kata lain, model etnis ini sangat subur secara sosiologis. Alasan ketiga yang dijelaskan adalah mengenai kebutuhan untuk menempa komponen budaya apapun yang tersedia merupakan mitologi dan simbolisme yang koheren dari komunitas sejarah dan budaya. Melalui ketiga alasan tersebut, bentuk interaksi antar bangsa maupun negara menjadi topik yang menarik untuk selalu dibahas terlebih apabila kedua entitas tersebut memiliki latar belakang etnik yang serupa namun karena dinamika politik yang terjadi, muncul dilematis identitas nasional yang terjadi antar dua negara tersebut, seperti yang terjadi pada kasus Tiongkok dan Taiwan ini.

Tiongkok maupun Taiwan memperoleh setidaknya dua hal pasca *Beijing Olympics 2008*, yakni dalam bidang pencitraan *national identity* dan *relationship building*. Dan penguatan *national identity* tersebut tercermin dalam tiga aspek, yang pertama adalah dalam aspek sejarah, yang mana kedua negara ini memiliki dinamika sejarah yang sangat berliku terkait penyelenggaraan olimpiade ini. Kedua, yakni dalam aspek upaya menjaga kedaulatan negara Taiwan yang dapat dilihat dari sejumlah kasus seperti estafet obor dan perselisihan antar delegasi kedua negara yang menggambarkan

pelabelan *national identity* masing-masing negara. Aspek kedua ini juga berkaitan dengan pelabelan “*One China*” yang sangat digalakkan oleh Tiongkok namun dalam perjalanannya Taiwan lebih memilih untuk tidak banyak mengambil sikap terhadap upaya pencitraan tersebut. Dan yang terakhir pada aspek perekonomian yang mengalami penurunan kerjasama pasca pagelaran *Beijing Olympics 2008* yang kemudian dalam hal ini turut mencerminkan *relationship building* diantara dua negara.

1.7.1.3 Konsep Hubungan Bilateral

Definisi konseptual mengenai Hubungan Bilateral sejatinya memiliki beragam pemahaman ditinjau dari aspek dan kepentingan yang melandasinya. Secara garis besar, konsep Hubungan Bilateral dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang dilakukan oleh dua negara. Menurut Oye (1985), Hubungan Bilateral dilakukan sebagai bentuk upaya yang dapat menguntungkan kedua pihak. Mengacu pada aspek yang ada, Hubungan Bilateral dapat berlangsung dalam berbagai bidang seperti. Ekonomi, Politik, Budaya, Lingkungan dan sebagainya. Jika kita kembali pada asumsi mendasar liberal mengenai demokrasi dan interdependensi, kita akan dapat menemukan capaian utama yang diinginkan adalah kesejahteraan (Oneal & Russett, 1997). Tidak heran jika dalam tata kelola global yang terjadi saat ini, setiap negara dapat melakukan berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan setiap penduduknya.

Jika ditarik melalui teori Konstruktivis, mereka menggunakan identitas sebagai alat utama dalam memandang kerjasama antara negara, yang mana negara bekerjasama dalam menciptakan identitas kolektif. Dan identitas kolektif ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan hubungan antar negara (Rousseau & Retemero, 2007). Sehingga dapat ditemukan keterhubungan antara teori Konstruktivis, Identitas Nasional dan Hubungan Bilateral yang menjadi benang merah dalam penelitian ini.

1.7.2 Tipe Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didasarkan pada data sekunder serta informasi yang telah diperoleh dari literatur terdahulu atau data resmi kedua negara. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai berbagai hal yang terjadi di dalam dunia sosial (Hancock, Ockelford, & Windridge, 2009).

1.7.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dalam upaya Konstruktivis yang dilakukan oleh Tiongkok dan Taiwan dalam penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008* yang merupakan upaya pembangunan citra *national identity* mereka. Sebagai hasil akhirnya, penulis akan me Jangkauan penelitian ini berkisar selama proses persiapan Beijing sebagai *host country* pada *Olympic Summer Games 2008* pada tahun 2000 hingga akhir tahun 2009 untuk melihat dampak penyelenggaraan olimpiade tersebut terhadap perkembangan hubungan bilateral Tiongkok dengan Taiwan

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau literature yang sudah ada. Studi literatur yang dikaji meliputi jurnal, artikel, buku, media massa, surat kabar, serta data resmi pemerintah yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Sebagai Teknik analisis data, penulis menggunakan model analisis Spradley yang memiliki tiga tahap yaitu, analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponensial (Spradley, 1980). Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh terkait topik yang dibahas. Kemudian, analisis taksonomi diperlukan untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain. Dan yang terakhir adalah analisis komponensial yang bertujuan untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: pada BAB pertama ini, penulis menguraikan pendahuluan yang menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, hingga metode penelitian

BAB II: tulisan pada BAB kedua memuat penjelasan mengenai latar belakang sejarah kedua negara dalam prinsip *One China* serta dinamika hubungan antara Tiongkok dan Taiwan, khususnya dalam hal terkait hubungan politik dan ekonomi.

BAB III: pada BAB III ini, penulis akan menjabarkan analisis upaya Konstruksi Identitas Nasional yang dibangun oleh dua negara, yaitu Tiongkok dan Taiwan. Analisis upaya Konstruksi ini terbagi dalam dua penjabaran melalui masing-masing sudut pandang kedua negara dengan dua kepentingan yang bertolak belakang, yaitu antara *One China* dan kedaulatan kemerdekaan.

BAB IV: pada bagian ini, penulis akan mulai menjabarkan analisis dampak yang terjadi sebagai bentuk respon upaya Konstruksi yang sudah dilakukan oleh kedua negara. Analisis pada BAB ini akan diurai terutama pada aspek perekonomian yang mengalami pertumbuhan pasca penyelenggaraan *Beijing Olympics 2008*.

BAB V: pada BAB terakhir ini, penulis merangkai kesimpulan yang telah berhasil didapatkan setelah proses analisis dilakukan